

**RENCANA KERJA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2022**



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 35

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 93);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);

26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023.

BAB I

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2023.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), adalah sebagai berikut :

BUKU I : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- BAB VII : Penutup

BUKU II : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 8 Juli 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 8 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 35

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK


SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2023

DAFTAR LAMPIRAN

- I. BUKU I : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA DEPOK
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH
 - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
 - BAB VII PENUTUP
- II. BUKU II : PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

**BERITA ACARA VERIFIKASI RANCANGAN RENJA PD TAHUN 2023
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KOTA DEPOK TAHUN 2023
Perangkat Daerah (PD): Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**

Nomor: 01 /VRJ-23/IV-22/PM

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan April tahun 2022 bertempat di Bappeda Kota Depok, Jalan Margonda Raya No.54 Depok, telah dilakukan Verifikasi terhadap Rancangan Renja PD Tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kota Depok No.9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026.
2. Rancangan RKPD Kota Depok 2023.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Surat Edaran Walikota Depok No.050/13-Bappeda, tanggal 10 Januari 2022 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.
6. Surat Edaran Nomor 050/22/Bappeda tanggal 14 Januari 2022 tentang Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
7. Surat Kepala Bappeda No. 050/427/PPED-Bapp/2022 tanggal 8 April 2022 perihal Verifikasi Rancangan Renja PD Tahun 2023.

B. Hasil verifikasi:

1. Kelengkapan Dokumen

Cek kelengkapan dokumen sebagaimana Surat Kepala Bappeda No. 050/427/PPED-Bapp/2022 tanggal 8 April 2022 perihal Verifikasi Rancangan Renja PD Tahun 2023:

Nama Dokumen	Ada/tidak ada		Keterangan
	Ada	Tidak ada	
1. Surat Pengantar		√	

Nama Dokumen	Ada/tidak ada		Keterangan
	Ada	Tidak ada	
2. Berita Acara Forum PD Tahun 2022		√	
3. Rancangan Renja PD 2023 sebagaimana SE Walikota Depok No.050/13-Bappeda, tanggal 10 Januari 2022		√	
4. Tabel Renja hasil print out dari SIPD	√		sesuai
5. KAK	√		19 RKA dari 37 sub kegiatan
6. RKA	√		17 KAK dari 37 sub kegiatan
7. Dokumen manajemen resiko, dan, perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG)	√		Perbaiki substansi manajemen resiko dan PPRG
8. Dokumen pendukung/pelengkap, seperti :			
- FS			Tidak diperlukan
- DED			Tidak diperlukan
- Dokumen kelengkapan aset			Tidak diperlukan
- Proposal,			Tidak diperlukan
- CPCL			Tidak diperlukan
9. Berita Acara Forum PD	√		
10. Berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.	-	-	

2. Cek kelengkapan Renja 2023 PD

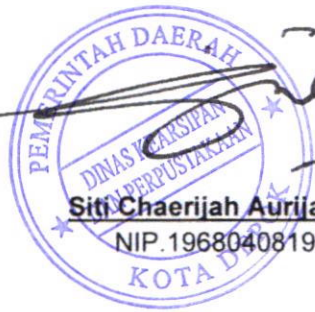

- a. Pagu anggaran 2023 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan sebesar Rp 13,145,729,240 dan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan sebesar Rp 1,774,500,000 sudah sesuai dengan Rancangan RKPD Kota Depok 2023.
- b. Terdapat 1 (satu) nomenklatur sub kegiatan yang belum sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021
- c. Terdapat 1 (satu) nomenklatur program yang belum selaras dengan RPJMD 2021-2026
- d. Janji Wali Kota sudah masuk ke dalam Renja 2023 (khusus PD pengampu)

C. Komitmen

Kami penanggung jawab Perangkat Daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran berkomitmen melaksanakan hasil verifikasi ini ke tahap selanjutnya dan bersedia dijatuhi sanksi sesuai peraturan yang berlaku apabila tidak melaksanakan hasil verifikasi ini dengan sebenar-benarnya .


Demikian berita acara dibuat dan dokumen lampiran hasil evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berita acara ini.

Penanggung Jawab PD



Siti Chaerijah Aurijah, S.Pd., MM
NIP. 196804081991032008

Tim Evaluasi
Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia



Yulia Oktavia, S.Si. Apt, MM
NIP. 19771008 200112 2 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayah -Nya, sehingga Rencana kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok selama kurun waktu 1 (Satu) Tahun.

Sebagai suatu instrument kebijakan daerah Rencana Kerja (RENJA) memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, karena selain dapat memberikan arahan dalam pelaksanaan kerja, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja itu sendiri. Selain itu rencana kerja adalah sebagai acuan awal sekaligus pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok selama kurun waktu 1 (satu) Tahun. Adapun Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk menentukan skala kebutuhan yang di proyeksikan secara bertahap setiap tahunnya yang dilaksanakan pada masa sekarang maupun mendatang.

Demikian, semoga Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dapat bermanfaat bagi kita semua.

Depok, 18 Mei 2021

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA DEPOK**



f **SITI CHAERIJAH AURIJAH, S.Pd.MM**

Nip. 196804081991032008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Depok.	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Depok	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Depok.....	29
2.4 Review Usulan Program Dan Kegiatan Dinas	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	39
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	40
3.1 Tujuan dan Sasaran	40
3.2 Strategi dan Kebijakan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..	43
Program dan Kegiatan	43
BAB V PENUTUP	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cakupan perencanaan pembangunan harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik dokumen perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini juga berpedoman pada *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.*

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu

kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi maupun APBN. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikan dalam program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
5. Perumusan rancangan akhir;
6. Penetapan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok tahun 2023, antara lain :

1. Substansi Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perwali RKPD;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan;

3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan/ sub kegiatan, target keluaran kegiatan/ sub kegiatan total dana yang diperlukan kegiatan;
4. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok merupakan dokumen resmi program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan Nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .

Perangkat Daerah sebagai salah satu stakeholder kunci di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan.

Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (lembaran Negara Nomor 74 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga(lembaran Negara Nomor 75 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
13. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran Negara Nomor 96 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (lembaran Negara Nomor 10 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Walikota Depok Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
26. Peraturan Walikota Depok Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;

3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2023 disusun dengan sistematika sesuai *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*, dan juga berpedoman Pada *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*, yakni sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan penyusunan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan .

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kota Depok.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup di antaranya catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Berita Acara dan Foto Dokumentasi Forum PD Tahun 2023
2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Tahun 2024

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sampai dengan Tahun 2022 diperlukan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahun 2023. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan terus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan tersebut adalah :

1. Bangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok yang representatif, dilengkapi dengan fasilitas pendukung dan fasilitas wifi di semua ruangan, sehingga semakin menarik masyarakat untuk berkunjung ke Perpustakaan;
2. Semakin optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses dan sistem layanan;
3. Koleksi bahan Perpustakaan yang setiap tahun bertambah jumlahnya dan juga bervariasi judulnya;
4. Mobil Perpustakaan keliling sebanyak 4 unit, untuk melakukan layanan ke seluruh wilayah di Kota Depok sehingga dapat mengajak sejak dini dan dapat menumbuhkan minat baca kepada masyarakat khususnya anak usia sekolah;

5. Telah dilakukannya pembaharuan sistem otomasi kearsipan sehingga dapat mendukung dan menyelamatkan arsip yang bernilai guna;
6. Sarana dan prasana yang terus diupayakan pengadaannya dalam pemeliharaan arsip di Depo Arsip;
7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis.

Capaian review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2021, dan realisasi Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

(tabel 2.1) terlampir

Tabel 2.1.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Daerah s/d Tahun 2021 Kota Depok
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok**

Nama Perangkat Daerah

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3) TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TAHUN 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
	A	URUSAN KEARSIPAN								
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK								
1.02.18.1.02.18.001.	I	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran							
1.02.18.1.02.18.001.03.	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	70 Jenis	58 Jenis	58 jenis	58 jenis	100%		
1.02.18.1.02.18.001.04.	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang tersedia	20 Jenis	16 Jenis	16 jenis	16 jenis	100%		
1.02.18.1.02.18.001.05.	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	17 Jenis	17 Jenis	17 jenis	17 jenis	100%		
1.02.18.1.02.18.001.06.	4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat RT yang tersedia	30 Jenis	45 Jenis	45 jenis	45 jenis	100%		
1.02.18.1.02.18.001.07.	5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Mamin yang tersedia	7 Jenis	7 Jenis	7 jenis	7 jenis	100%		

1.02.18.1.02.18.001.08.	6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang tersia	274	278	104 OH Dalam Daerah, 129 OH Luar Daerah	104 OH Dalam Daerah, 129 OH Luar Daerah	100%			
1.02.18.1.02.18.002.	II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1.02.18.1.02.18.002.01.	1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	5 jenis	5 gd	2 gd	2 gd	100%			
1.02.18.1.02.18.002.02.	2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pemeliharaan	8	10	7 kendaraan roda 4, 3 kendaraan roda 2	7 kendaraan roda 4, 3 kendaraan roda 2	100%			
1.02.18.1.02.18.002.03.	3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan	8 jenis	8 jenis	4 jenis	4 jenis	100%			
1.02.18.1.02.18.002.07.	4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	7 jenis	5 jenis	-	-	-			
1.02.18.1.02.18.005.	III	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase Pegawai Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi								
1.02.18.1.02.18.005.02.	1	Bimtek Manajemen Kearsipan dan Perpustakaan Bagi Aparatur Diskarpus	Jumlah Orang	250 orang	-	-	-	-			
1.02.18.1.02.18.005.03.	2	Bimbingan Teknis Kearsipan bagi OPD	Jumlah Orang	895 orang	240 orang	-	-	-			
1.02.18.1.02.18.005.04.	3	Workshop Kearsipan	Jumlah orang	300 orang	50 orang	-	-	-			
1.02.18.1.02.18.006.	IV	PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Sakip								
1.02.18.1.02.18.006.01.	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%			
1.02.18.1.02.18.022.	V	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEHNOLOGI INFORMATIKA	Cakupan Layanan e-Government Yang Terintegrasi								

		Pengembangan Sistem Kearsipan	Jumlah Sistem	4 sistem	1 sistem						
1.02.18.1.02.18.022.02.	1	Pemeliharaan Sistem Kearsipan	Jumlah Sistem	4 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	100%			
1.02.18.1.02.18.028.	VI	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	Cakupan Integrasi Perencanaan								
1.02.18.1.02.18.028.01.	1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%			
1.02.18.1.02.18.028.08.	2	Penyusunan Raperda Kearsipan	Jumlah Dokumen	1	0	1 dok perda	1 dok perda	100%			
1.02.18.1.02.18.035.	VII	PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN	Presentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah								
1.02.18.1.02.18.035.01.	1	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Jumlah yang dibina	103	37	22 PD	22 PD	100%			
1.02.18.1.02.18.035.03.	2	Penelusuran Arsip Bersejarah	Jumlah objek	8	17	-	-	-			
1.02.18.1.02.18.035.06.	3	Pengembangan Pedoman Kearsipan	Jumlah Pedoman	4	1	-	-	-			
1.02.18.1.02.18.035.11.	4	Sosialisasi Kearsipan	Jumlah Orang	300	100	50 orang	50 orang	100%			
1.02.18.1.02.18.035.13.	5	Pengawasan Internal Kearsipan se Kota Depok	Jumlah PD	136 titik/ PD	6 PD	50 Titik	50 Titik	100%			
1.02.18.1.02.18.035.15.	6	Penyediaan Diorama/ Wall of Fame	Jumlah kegiatan	4 keg	2 keg	-	-	-			
1.02.18.1.02.18.035.04.	7	Penambahan Khasanah Arsip Audivisual	Jumlah lomba	3	2	1 kali lomba	1 kali lomba	100%			
1.02.18.1.02.18.035.08.	8	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah berkas	165	45 berkas	-	-	-			
1.02.18.1.02.18.035.17.	9	Pengelolaan Pemasarakatan Arsip	jumlah lokasi	120	50 lokasi	35 lokasi	35 lokasi	100%			
1.02.18.1.02.18.035.20.	10	Layanan Jasa Kearsipan	Jumlah orang	340 orang	100 orang	110 orang	110 orang	100%			
	11	Publikasi Kearsipan melalui media cetak dan elektronik	Jumlah Publikasi	13 publikasi	10 publikasi						
	B	URUSAN PERPUSTAKAAN									
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK									

1.02.17.1.02.18.042.	VIII	Peningkatan Minat Baca Masyarakat	Prosentase Minat Baca Masyarakat								
1.02.17.1.02.18.042.01.	1	Penyediaan Koleksi Buku Bacaan Perpustakaan	Jumlah koleksi buku bacaan atau koleksi bahan pustaka	5.202	44.887 eksp	3.000 eksp, 1 paket e-book, 50 dvd	3.000 eksp, 1 paket e-book, 50 dvd	100%			
1.02.17.1.02.18.042.02.	2	Pengolahan Koleksi Bahan Perpustakaan	Jumlah koleksi perpustakaan	5000 eks	5000 eks	5.000 eks	5.000 eks	100%			
1.02.17.1.02.18.042.05.	3	Pembinaan Perpustakaan dengan E-Library	Jumlah perpustakaan yang dibina	5 perpustakaan	30 perpustakaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	100%			
1.02.17.1.02.18.042.06.	4	Bimbingan Teknis Perpustakaan Bagi Pengelola Perpustakaan Sekolah	Jumlah orang yang dibimtek	100 orang	300 orang	-	-	-			
1.02.17.1.02.18.042.03.	5	Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka	Jumlah buku	5000 eks	6.500 eksp	1000 eks	1000 eks	100%			
1.02.17.1.02.18.042.07.	6	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah pelayanan	600 titik	1.150 titik	350 titik	350 titik	100%			
1.02.17.1.02.18.042.08.	7	Pemasyarakatan Gemar Membaca	Jumlah Lomba, Jumlah bedah buku, jumlah pelatihan	8	3 jenis lomba, 2 kali bedah buku, dan 1 kali pelatihan mendongeng	-	-	-			
1.02.17.1.02.18.042.09.	8	Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah TBM	10 TBM	51 TBM	4 TBM	4 TBM	100%			
1.02.17.1.02.18.042.10.	9	Pembinaan Perpustakaan Kelurahan	Jumlah perpustakaan yang ditata	10 kel	28 kel	-	-	-			
1.02.17.1.02.18.042.11.	10	Survey Minat Baca Masyarakat	jumlah dokumen	1 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%			

		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Minat Baca Masyarakat						55%		
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Minat Baca Masyarakat	-	-	55 %	68.19%	123.8%	55%		33,18%
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Buku	-	-	1000 Buku	1000 Buku	100%	1000 Buku	450	45%

		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan	-	-	5 Perpustakaan Sekolah	5 Perpustakaan Sekolah	100%	5 Perpustakaan Sekolah	3	60%
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi perpustakaan	-	-	3500 eks; 1 paket e-book; 1 paket dvd	3500 eks; 1 paket e-book; 1 paket dvd	100%	3500 eks; 1 paket e-book; 1 paket dvd	1.123 eks 1 paket e book	32,10%
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Koleks Perpustakaan	-	-	5000 Eksp	5000 Eksp	100%	5000 Eksp	1.440 eksp	28,80%
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	-	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Minat Baca Masyarakat	-	-	55 %	68.19%	123.8%	55%		25,11%
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Cakupan Layanan Perpustakaan Keliling	-	-	400 titik	402 titik	100.50%	400 titik	152 titik	25,33%
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan kelurahan	-	-	10 Kelurahan	10 Kelurahan	100%	10 Kelurahan	5 kel	50%
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah lomba, Jumlah Bedah Buku dan Jumlah Pelatihan	-	-	1 jenis; 1 pelatihan	1 jenis; 1 pelatihan	100%	1:1	0	0%

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran; NILAI SAKIP; Cakupan integritas perencanaan KIP;	-	-	100%; 100%; BB; 100%; 100%	100%; 100%; BB; 100%; 100%	100%	100%; 100%; BB; 100%; 100%		34,97%
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan integritas perencanaan, Nilai SAKIP	-	-	100%	100%	100%	100%, BB		50%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 Dokumen	2 Dok	60%
				-	-	1 Dok	1 Dok	100%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan	Jumlah Dokumen	-	-	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	1 Dok	50%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan	-	-	BB	BB	100%	Nilai SAKIP	BB	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Anggaran	-	-	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	1 Dok	50%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%; 100%	100%; 100%	100%	100%; 100%		82,22%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	20 jenis	20 jenis	100%	20 Jenis	20 jenis	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	-	17 jenis	17 jenis	100%	17 Jenis	17 Jenis	100%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	-	-	30 Jenis	30 Jenis	100%	30 Jenis	29 jenis	96,67%

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	-	-	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	6 jenis	85,71%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	-	-	100 OH DD; 134 OH LD	100 OH DD; 134 OH LD	100%	100 OH DD; 134 OH LD	25 OH DD, 51 OH LD	20,32%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis inventaris Kantor; Jenis Alat Tulis Kantor	-	-	9 Jenis; 70 Jenis	9 Jenis; 70 Jenis	100%	9 Jenis; 70 Jenis	1-/68 jenis	89,61%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	100%		76,67%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	-	-	7 Kendaraan Roda 4; 3 kendaraan Roda 2; 1 kendaraan roda 3	7 Kendaraan Roda 4; 3 kendaraan Roda 2; 1 kendaraan roda 3	100%	7 Kendaraan Roda 4; 3 kendaraan Roda 2; 1 kendaraan roda 3	6 mobil, 2 motor	80%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jenis Pemeliharaan	-	-	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	4 jenis	50%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Yang Dipelihara	-	-	2 Gedung	2 Gedung	100%	2 Gedung	2 gd	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan Layanan e-Government yang terintegrasi, Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah dan Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	-	-	100%; 21,4%; 100%	100%; 29,8%; 100%	103.6%	100%; 21,4%; 100%		25%, 8,37 %, 0%

		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	-	-	21.4%	29.9%	139.6%	21,40%		8,37%
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah pengelolaan arsip dinamis	-	-	22 PD	22 PD	100%	22 PD	12 PD	54,55%
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	-	-	21.4%	21.4%	100%	21,40%		50%
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip yang di Akuisisi	-	-	50 berkas	50 berkas	100%	50 Berkas; 1 lomba	.../ 1 lomba	50%
			Jumlah Khasanah Arsip	-	-	1 lomba	1 lomba	100%			
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Cakupan Layanan e-Government yang terintegrasi, Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah dan Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	-	-	100%; 21.4%; 100%	100%; 21.4%; 100%	103.62%	100%; 21,4%; 100%		50%
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah sistem dipelihara; Jumlah pelayanan jasa kearsipan	-	-	1 sistem; 120 orang	1 sistem; 120 orang	100%	1 sistem; 120 orang	.../ 60 orang	50%
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah orang	-	-	50 orang	50 orang	100%	100 orang; 100 orang	-	
			Jumlah peserta workshop	-	-	50 orang	50 orang	100%			
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	-	-	21,4%	21,4%	100%	21,4%		11,31%

		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	-	-	21,4%	21,4%	100%	21,40%		11,31%
		Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	jumlah titik	-	-	25 titik	25 titik	100%	25 titik	25 titik	100%
		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	-	-	21.4%	21.4%	100%	21,40%		0%
		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Lokasi	-	-	25 Lokasi	25 Lokasi	100%	25 lokasi	-	0%
		PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	-	-	21.4%	21.4%	100%	21,4%		0%
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan dan Layanan Lembaga Kearsipan Daerah	-	-	21.4%	21.4%	100%	21,40%		0%
		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Pedoman Kearsipan	-	-	1 pedoman	1 pedoman	100%	1 pedoman	-	0%

Terdapat **12 sub kegiatan yang refocusing dan di perubahan anggaran APBD Tahun 2021**, yaitu :

1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
2. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
9. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
10. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
11. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
12. Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

Dan dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok melaksanakan 5 Program 12 Kegiatan dan 27 sub kegiatan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Wali Kota Depok Nomor : 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada Daerah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok tidak mempunyai SPM/Standar Nasional, dan hanya menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai indikator kinerja dalam pencapaian kinerja pelayanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM (Pengguna Layanan);
2. Presentase Lembaga Pemerintahan Yang Telah Mengelola Arsipnya Secara Baku;
3. Predikat sakiip;
4. Presentase Minat Baca Masyarakat
5. Jumlah Pemustaka / Pengunjung Yang Datang Ke Perpustakaan Umum Kota Depok;
6. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (Dalam Eksemplar);
7. Persentase Perpustakaan di Kota Depok Yang Dibina.

Pencapaian indikator kinerja utama Perangkat Daerah tahun 2021- 2026 dari masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program yang mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM (Pengguna Layanan) adalah sebagai berikut :
“ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah “ sedangkan kegiatan dan sub untuk mencapai program tersebut tertuang dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- b. Program yang mendukung tercapainya Presentase Jumlah Lembaga Pemerintah Yang Telah Mengelola Arsipnya Secara Baku adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota

- Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota

- Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota

- Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN
- Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

- Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun

Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota

- Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana

PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP

Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota

- Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

C. Program yang mendukung tercapainya Nilai SAKIP adalah sebagai berikut :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

D. Program yang mendukung tercapainya :

- a. Presentase Minat Baca Masyarakat
- b. Jumlah Pemustaka / Pengunjung Yang Datang Ke Perpustakaan Umum Kota Depok
- c. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka (Dalam Eksemplar)
- d. Persentase Perpustakaan di Kota Depok Yang Dibina

adalah sebagai berikut :

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Bahan Pustaka
- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat
- Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

Adapun capaian sasaran pada tahun 2021 dicapai melalui 5 Program, 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pengelolaan Arsip
3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
4. Program Perizinan Penggunaan Arsip
5. Program Pembinaan Perpustakaan

Pada tahun 2021 meningkatnya masyarakat yang gemar membaca dengan target sebanyak 37.000 orang dan realisasi sebanyak, 13.167 orang atau sebesar 35.59 %. Indikator kinerja tersebut tidak tercapai 100 % karena pada tahun 2021 adanya pemberlakuan Pembatasan Kegiatan karena Pandemi Covid 19.

Realisasi dana untuk sasaran meningkatnya minat baca masyarakat pada tahun 2021 didukung program peningkatan minat baca masyarakat sebesar Rp 1.390.470.345,- program tersebut capaian sasaran 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 1.345.893.151,- atau 96.79 %.

Adapun target Minat Baca Masyarakat 2019 sebesar 45% , realisasi 64,88% target tahun 2020 sebesar 50% realisasi 66,37%. Sedangkan realisasi tahun 2021 dari target sebesar 55% yang tersealisasi 68,19%, sedangkan untuk tahun 2022 dari target sebesar 58,33 dan yang terealisasi sebesar 69,87%, *hal ini jelas menunjukkan bahwa Target Minat Baca terus mengalami peningkatan.*

Program yang mendukung tercapainya capaian Presentase jumlah unit kerja menerapkan arsip baku adalah program Peningkatan Pengelola Kearsipan dengan capaian di tahun 2021 adalah 21,4% anggaran di tahun 2021 adalah Rp. 1.312.130.320,- dengan realisasi Rp. 1.293.095.58,- atau sebesar 98.55 % dengan tingkat capaian kinerja sangat tinggi, sedangkan untuk tahun 2022 dari target Pengelolaan Kearsipan dari yang targetnya 21,40% dengan anggaran sebesar Rp. 2.353.485.850.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 (terlampir)

Tabel 2.2.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NPSK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2021 (TAHUN N-2)	TAHUN 2022 (TAHUN N-1)	TAHUN 2023 (TAHUN N)	TAHUN 2024 (TAHUN N+1)	TAHUN 2021 (TAHUN N-2)	TAHUN 2022 (TAHUN N-1)	TAHUN 2023 (TAHUN N)	TAHUN 2024 (TAHUN N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM (Pengguna Layanan)	-	-	-	Baik	Baik	-	-	Baik	Baik	x	x	x
2	Predikat SAKIP				B	BB	-	-	B	BB	x	x	
3	Prosentase OPD Kota Depok Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Baku	-	-	-	21,40%	21,40%	42,10%	63,15%	29,88%	21,40%	42,10%	63,15%	Jumlah perangkat daerah yang telah memenuhi standar baku kearsipan/jumlah perangkat daerah X 100%
4	Prosentase Minat Baca Masyarakat	-	-	-	55%	58,33%	59,43%	60,53%	68,19 %	69,87%	x	x	x
5	Jumlah pemustaka/ pengunjung yang datang ke Perpustakaan Kota Depok	-	-	-	37.000 orang	42.000 orang	47.000 orang	52.000 orang	13.167 orang	45.190 orang	x	x	x
6	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	-	-	-	42.000 eksp	47.000 eksp	52.000 eksp	57.000 eksp	51.808 eksp	57.578 eksp	x	x	x
7	Persentase Perpustakaan Yang Dibina	-	-	-	NA	11,11%	10,42%	x	3,29 %	32,9 %	x	x	x
8	Nilai Sakip	-	-	-	NA	72	73	74	73,20	-	x	x	Nilai SAKIP PD
9	Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	-	-	-	NA	NA	20%	40%	20%	40%	20%	40%	Jumlah penyelamatan dan pelestarian arsip yang dapat diselamatkan/jumlah arsip yang harus diselamatkan, dilestarikan X 100%

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2023

10	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	-	-	-	NA	NA	58,33	59,43	58,57	61,25	-	-	Rata-Rata Ketersediaan fasilitas membaca + Rata-Rata pemanfaatan bahan bacaan + Rata-Rata dan kebiasaan membaca dibagi 3
11	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	-	-	-	42.000 Orang	NA	47.000 orang	52000 orang	22.875 orang	43.511 orang	47000 orang	52 000 orang	Rata-Rata Jumlah Pengunjung Perpustakaan/ Tahun
12	Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	-	-	-	NA	47.000 eksp	52.000 eksp	57000 eksp	61.826 eksp	67.013 orang	52 000 eksp	57000 eksp	Jumlah Total Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Dari tabel tersebut diatas, dapat kita simpulkan bahwa :

1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok tidak ada target capaian SPM/ maupun target nasional serta target IKK.
2. Capaian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok terhadap Pelayanan Masyarakat sudah baik.
3. Capaian indikator SAKIP dari tahun 2019, semakin meningkat yaitu pada tahun 2020 nilai 72,87 kategori Sangat Baik, kemudian meningkat di tahun 2021 dengan nilai 73,20 dengan kategori Sangat Baik.
4. Capaian indikator Persentase OPD Kota Depok Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Baku tercapai dikarenakan pendampingan penataan arsip tetap berjalan dengan baik.
5. Capaian indikator Persentase Minat Baca Masyarakat tercapai berdasarkan survey jasa konsultasi bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, target tercapai dikarenakan adanya peningkatan pelayanan perpustakaan melalui e – perpus dan pengadaan buku elektronik/ e-book.
6. Capaian indikator Jumlah pemustaka/ pengunjung yang datang ke Perpustakaan Kota Depok pada tahun 2021 tidak tercapai dikarenakan adanya aturan pembatasan aktifitas di masa PSBB dan PPKM, namun di Tahun 2022 mengalami peningkatan cukup tinggi disbandingkan dengan tahun 2021 ketika diberlakukan PSBB dan PPKM.
7. Capaian indikator Jumlah Koleksi Bahan Pustaka tercapai dikarenakan adanya pengadaan buku oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, baik itu koleksi buku cetak maupun buku elektronik/ e-book

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK

Hasil analisis capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa issue utama dalam pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok adalah peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah. Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya antara lain :

1. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kearsipan dan perpustakaan;

3. Optimalisasi penerapan sistem pengelolaan kearsipan sesuai standard baku arsip;
4. Rendahnya Budaya Baca Masyarakat;
5. Meningkatkan Layanan Perpustakaan dan jaringan layanan perpustakaan keseluruhan wilayah kelurahan;
6. Perlu meningkatkan dukungan *stake holder*, masyarakat dan aparat pemerintah Kelurahan untuk pembangunan Perpustakaan Kelurahan/Kecamatan/Rumah Ibadah/Perpustakaan Khusus dan perpustakaan masyarakat;
7. Optimalisasi pemanfaatan fungsi arsip sebagai penunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi.

Pencapaian Visi, Misi Kepala daerah terhadap Capaian Program dan Kegiatan

Tabel 2.3.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program

Visi : Kota Depok Yang Unggul, Nyaman, dan Religius				
NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Diskarpus Kota Depok	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Transparan			
	Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan	Pengelolaan Arsip di Pencipta Arsip Belum sesuai Standar Baku Kearsipan	Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Belum Efektif	Penguatan Regulasi Kearsipan
2	Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kreatif dan Berdaya Saing			
	Program Peningkatan Minat Baca Masyarakat	Rendahnya Budaya Baca Masyarakat	Koleksi Bahan Perpustakaan Belum lengkap sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Komitmen Stakholder Untuk Koleksi Perpustakaan Lengkap

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.

Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/ Non Pemerintah
	Kategori*	Deskripsi Masalah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
042 Prosentase Minat Baca Masyarakat	Operasional	Pelayanan Perpustakaan Umum ada di Pusat Pemerintahan Kota Depok, sehingga pelayanan tidak maksimal	Layanan perpustakaan keliling merupakan layanan ekstensi atau perluasan layanan dari perpustakaan umum yang digerakkan oleh petugas perpustakaan, Penyelenggaraan perpustakaan keliling ini bertujuan untuk mendekatkan koleksi kepada pemakainya, sebab banyak pemakai yang tinggal jauh dari perpustakaan tidak berkesempatan mengunjungi perpustakaan. Padahal, mereka juga membutuhkan layanan perpustakaan. Lokasi layanan perpustakaan keliling seperti sekolah yang jauh dari perpustakaan umum, dan keramaian (car fee day)	Diskarpus, bekerja sama penggiat literasi seperti TBM, Bunda Literasi Kota Depok dan Bunda Literasi Kecamatan
		Pelayanan Perpustakaan Umum di masa Pandemi Covid 19 kurang maksimal karena adanya Peraturan PSBB dan PKKM	Layanan buku digital atau buku elektronik, disingkat e-book, atau ebook, adalah bentuk digital dari buku cetak. Buku cetak pada umumnya terdiri atas setumpuk kertas dijilid yang berisi teks atau teks dan atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang dapat berisi teks, gambar, audio, video.	

Terhadap isu-isu penting yang dihadapi sekarang ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terkait rendahnya budaya baca masyarakat, di masa pandemi covid 19 dengan adanya peraturan PSBB dan PPKM, pelayanan perpustakaan umum juga dibatasi dalam memberikan pelayanan. Dan salah satu upaya untuk meningkatkan budaya baca yaitu dengan mengadakan buku elektronik/ e-book yang gampang diakses oleh masyarakat melalui e-perpus melalui HP android maupun perangkat komputer.
Dalam pengadaan buku elektronik/ e-book Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok pada tahun perencanaan tahun 2022 melalui Program Pembinaan Perpustakaan, Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kota/ Kabupaten dengan Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka.
2. Optimalisasi fungsi arsip sangat dibutuhkan oleh individu, masyarakat, pemerintahan sebagai bukti otentik. Hal ini dibutuhkan kesadaran dalam mengelola arsip yang baik dan benar. Upaya upaya yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah dengan melaksanakan pembinaan dan pemasyarakatan kearsipan melalui Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Kabupaten/ Kota dengan Sub Kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip akibat Bencana.
3. Optimalisasi penerapan arsip baku dalam sistem pemerintahan sangat mutlak dibutuhkan, Untuk itu salah satu fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah melaksanakan pembinaan di bidang arsip. Upaya yang dilaksanakan melalui pembinaan dan penataan arsip bagi Perangkat Daerah se Kota Depok, melalui Program Pengelolaan Arsip, Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis.

2.4 REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Rencana Kerja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) terhadap Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Perubahan tersebut didasari oleh :

- a. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terkait waktu dan mekanisme perubahan RPJP dan RPJMD;
- b. Penyesuaian RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026;
- c. Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2021-2026.

Beberapa perubahan (penambahan) kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pemindahan Arsip dari Kabupaten Bogor

Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

(tabel 2.4) terlampir

Tabel 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Depok

NAMA PERANGKAT DAERAH ; DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Indikator Kinerja	Target Capaian					Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7
02401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100%	11.684.417.558	02401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100%	10.767.610.016	
22401	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	82.500.000	22401	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	188.663.700	
22401	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Depok	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	4 Dokumen	49.500.000	22401	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Depok	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	4 Dokumen	155.663.750	
22401	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reliasasi Kinerja SKPD	Kota Depok	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Dok	33.000.000	22401	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reliasasi Kinerja SKPD	Kota Depok	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	17 Dok	32.999.950	
22402	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangann tepat waktu	100%	10.097.371.266	22402	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangann tepat waktu	100%	9.097.971.066	

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2023

2	2	0	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Depok	Jumlah ASN	12 Bulan 50 Orang	10.082.371.266	2	2	01	0	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Depok	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 50 Orang	9,082,371,266	
2	2	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Depok	Jumlah Laporan Keuangan	18 Dokumen	15.000.000	2	2	01	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Depok	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	18 Dokumen	14.999.800	
					-	-	-	-	-	2	2	01	0	0	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	100%	53.713.200	
					-	-	-	-	-	2	2	01	0	0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Depok	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	24.999.800	
					-	-	-	-	-	2	2	01	0	0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	28.713.400	
2	2	0	0	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Depok	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	100%	104.500.000	2	2	01	0	0	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Depok	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	100%	126.491.600	
2	2	0	0	0	-	-	-	-	-	2	2	01	0	0	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Depok	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	20.049.800	
2	2	0	0	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Depok	Jumlah Peserta	60 orang	104.500.000	2	2	01	0	0	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Depok	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	106.441.800	

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2023

2	2	0	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Depok	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	100%	1.104.996.292	2	2	01	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Depok	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	100%	951.063.450
2	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	17 paket	60.500.000	2	2	01	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	54.998.400
2	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70 jenis 7 jenis	595.800.000	2	2	01	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket 4 Paket	430.000.000
2	2	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	30 jenis	82.500.000	2	2	01	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	70.000.000
2	2	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Depok	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman	7 jenis	110.000.000	2	2	01	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Depok	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 paket	86.240.000
2	2	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Depok	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	20 jenis	71.396.292	2	2	01	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Depok	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	95.508.050
2	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Depok	Jumlah Orang/Hari	350 OH	184.800.000	2	2	01	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Depok	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 laporan	214.317.000
2	2	0	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100%	259.050.000	2	2	01	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100%	350.307.000
2	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan		Jumlah Kendaraan Dinas	10 unit	127.050.000	2	2	01	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	10 unit	144.820.000

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2023

				Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan pajaknya			
2	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Depok	Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	8 jenis	71.500.000	2	2	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Depok	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	69.987.000
2	2	0	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Grdung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Depok	Jumlah gedung	2 gedung	60.500.000	2	2	01	Pemeliharaan / Rehabilitasi Grdung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Depok	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	135.500.000
2	2	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	21,1%	1.380.500.000	2	2	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	42,1%	1.999.859.000
2	2	0	0	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Depok	Persentase Arsip Aktif Yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	100%	1.045.000.000	2	2	02	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Depok	Persentase Arsip Aktif Yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	100%	1.530.426.800
2	2	0	0	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah PD Jumlah Pedoman	8 PD 1 Dokumen	1.012.000.000	2	2	02	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	80 berkas	1.475.490.000
2	2	0	0	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis	Kota Depok	Jumlah Berita Acara Jumlah Perwal	2 BA 1 Perwal	33.000.000	2	2	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis	Kota Depok	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	4 berkas	24.937.000
				-	-	-	-	-	2	2	02	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Depok	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	38 laporan	29.999.800
2	2	0	0	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengelolaan Arsip Statis	100%	165.000.000	2	2	02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengelolaan Arsip Statis	100%	258.793.000

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2023

2	2	0	0	0	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Depok	Jumlah Berita Acara Akuisisi dan Laporan Jumlah khasanah arsip	1 BA 1 Lomba	165.000.000	2	2	02	0	0	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 arsp	258.793.000
2	2	0	0	0	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Kota Depok	Cakupan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	100%	170.500.000	2	2	02	0	0	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Cakupan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	100%	210.639.200
2	2	0	0	0	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Kota Depok	Jumlah informasi yang dapat diakses melalui JKN Jumlah Pengguna Layanan Arsip	1 sistem 130 orang	88.000.000	2	2	02	0	0	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	umlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	140 pengguna	177.499.450
2	2	0	0	0	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kota Depok	Jumlah unit kearsipan yang diberdayakan	46 unit	82.500.000	2	2	02	0	0	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	46 laporan	33.139.750
2	2	0	0	0	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	20%	137.500.000	2	2	03	0	0	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	40%	127.266.850
2	2	0	0	0	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Cakupan Arsip Yang Dimusnahkan dibawah 10 Tahun	100%	82.500.000	2	2	03	0	0	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Cakupan Arsip Yang Dimusnahkan dibawah 10 Tahun	100%	46.561.000
2	2	0	0	0	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan	Kota Depok	Jumlah arsip yang dinilai untuk dimusnahkan yang	7 daftar	82.500.000	2	2	03	0	0	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan	10 arsip	32.219.000

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2023

				Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		memiliki retensi di bawah 10 tahun					01	Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				
				-	-	-	-	-	2	2	03	0201	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Depok	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10	7 berkas	14.342.000	
2	2	0	0	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Kota Depok	Cakupan Arsip Yang Diselamatkan Akibat Bencana	100%	55.000.000	2	2	03	0202	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Kota Depok	Cakupan Arsip Yang Diselamatkan Akibat Bencana	100%	48.699.850	
2	2	0	0	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		Jumlah arsip yang Evakuasi, Identifikasi, dilindungi dan dipulihkan akibat bencana	20 daftar	55.000.000	2	2	03	0201	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	20 arsip	48.699.850	
				-	-	-	-	-	2	2	03	0203	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Depok	Cakupan Arsip Yang Diselamatkan Yang Digabung dan/ atay Dibukarkan	100%	32.006.000	
				-	-	-	-	-	2	2	03	0203	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	2 Daftar	16.003.000	
				-	-	-	-	-	2	2	03	0203	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat daerah kabupaten/kota	2 Arsip	16.003.000	Hibah sarpras u TBM usulan pokir, 3 TBM @Rp. 8.500.000,-

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2023

2	2	0			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	58.33	1.749.699.732	2	2	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	59.43	1.796.052.500
2	2	0	0		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Depok	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	100%	1.185.399.732	2	2	02	0	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Depok	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	100%	1.111.296.000
2	2	0	0	0	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Depok	Jumlah bahan pustaka yang terpelihara	1000 e book 1 sistem	25.300.000	2	2	02	0	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Depok	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1000 layanan	29.528.000
					-	-	-	-	-	2	2	02	0	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	11 Perpustakaan	14.220.000
					-	-	-	-	-	2	2	02	0	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Depok	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 perpustakaan	4.688.000
2	2	0	0	0	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Depok	Jumlah koleksi perpustakaan	1 paket e book 5000 eksemplar	440.000.000	2	2	02	0	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Depok	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	5000 eksemplar	364.352.000
2	2	0	0	1	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok	Jumlah data dan informasi perpustakaan Jumlah tenaga perpustakaan	2 dok 132 OB	720.099.732	2	2	02	0	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	2 dok	698.508.000

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program/Kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan. Dalam hal ini ada usulan masyarakat yang disampaikan melalui forum Musrenbang (Partisipatif) yang diusulkan melalui Pokir masuk untuk Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok tahun 2023.

Usulan melalui pokir diperuntukan untuk hibah belanja sarana prasarana Taman Baca Masyarakat. Adapun usulan tersebut dari 5 usulan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yakni 1 di Kecamatan Sawangan, 1 di Kecamatan Cilodong, 1 di Kecamatan Sukmajaya dan 2 di Kecamatan Cimanggis.

Tabel 2.5.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Depok

Nama Perangkat Daerah :

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Depok

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota -				
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	TBM Blandongan Rw.006 Kec. Sawangan	Jumlah TBM Yang Dibina	1 TBM	Pokir
		TBM Rw.006 Kel.Kalimulya Kec. Cilodong	Jumlah TBM Yang Dibina	1 TBM	Pokir
		TBM Rw. 009 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya	Jumlah TBM Yang Dibina	1 TBM	Pokir
		TBM Rw. 010 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis	Jumlah TBM Yang Dibina	1 TBM	Pokir
		TBM Rw.005 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis	Jumlah TBM Yang Dibina	1 TBM	Pokir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok disusun untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan, sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2019-2024, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kota Depok tahun 2021-2026, dan khususnya merujuk pada RKPD Kota Depok tahun 2023

Dalam RPJMN Tahun 2019-2024 dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan di Bidang Kearsipan menerapkan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik; serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Pengelolaan Kearsipan di dimulai sejak penciptaan, penyusutan sampai dengan pelestarian dan dilakukan pada semua jenis arsip, yaitu arsip statis dan dinamis. Hal tersebut sudah sesuai dengan kondisi yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Sedangkan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kearsipan khususnya arsiparis masih sangat terbatas, yakni terbatas hanya 10 orang arsiparis untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sedangkan se Kota Depok total keseluruhan arsiparis berjumlah 12 orang, Untuk mengatasi keterbatasan tersebut perlu dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kearsipan. Sedangkan di Bidang Perpustakaan, perkembangan jumlah perpustakaan dalam kurun waktu Tahun 2017-2020 sesuai standar sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Demikian juga untuk jumlah koleksi perpustakaan pada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat.

Peningkatan tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan. Disisi lain meningkatnya jumlah pengunjung juga dikarenakan meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan tersebut didukung oleh kegiatan perpustakaan keliling. Hal tersebut sudah sesuai dengan kondisi yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Sedangkan kondisi Sumber Daya Manusia(SDM) bidang Perpustakaan khususnya Pustakawan sudah cukup memadai, yaitu terdapat 10 orang Pustakawan. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia(SDM) bidang Perpustakaan.

Disamping itu penyusunan Rencana Kerja juga memperhatikan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2016-2020 yang telah dilaksanakan, dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan pemerhati kearsipan dan perpustakaan, terutama untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang ada.

Tabel 3.1.

Strategi dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Kearsipan

NO	STRATEGI	TELAAH KAJIAN SESUAI TUSI DAN URUSAN
1	2	3
1	Perpustakaan digital; Pembangunan Perpustakaan (e-Perpus)	<ul style="list-style-type: none"> - Koleksi Perpustakaan digital harus diupdate (keberadaan koleksi harus terjamin) - Sumber Daya Manusia, peran pustakawan sangat dituntut dalam kecakapan teknologi informasi - Peningkatan jangkauan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan keliling
2	Meningkatkan Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya budaya baca masyarakat - Belum maksimalnya simpul-simpul masyarakat gemar membaca
3	Pengelolaan arsip sesuai standar baku kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya pemahaman tentang peraturan kearsipan dan arti penting arsip dalam pelaksanaan tupoksi - Kurangnya sarana pengelolaan arsip sesuai baku kearsipan berbasis tehnologi informasi
4	Perlindungan dan pengamanan arsip vital/ arsip asset dengan efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pendampingan pemahaman tentang fungsi arsip

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikan dalam program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Memperhatikan evaluasi kinerja dan Isu-Isu Strategis yang sudah ditetapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
1.	Tersusunnya Arsip Daerah Yang Berkualitas Tinggi	1. Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah Yang Tertib	1 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	42,10%
			2 Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	40 %
		2. Terwujudnya Manajemen Internal Yang Akuntabel	Nilai SAKIP	73
2.	Terwujudnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat Kota Depok	Berkembangnya Budaya Gemar Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	59.43
			Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	47.000
			Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	52.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada **Rencana Kerja Tahun 2023** pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2021-2026, yang terdiri dari :

1. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang berlaku
2. Terciptanya perencanaan pembangunan daerah yang sinkron, serasi dan sinergi
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kemampuan teknis aparatur di Bidang Arsip dan Bidang Perpustakaan
4. Tersedianya sarana dan prasarana serta data di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok
5. Meningkatnya hasil koordinasi Kearsipan dan Perpustakaan antar daerah, propinsi, ANRI dan Perpusnas.

Keterkaitan visi dan misi kepala daerah dengan rumusan program dapat dilihat pada table 4.1.

Tabel 4.1.

VISI, MISI KEPALA DAERAH DAN
PROGRAM DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
1	2	3	4	5	6
URUSAN KEARSIPAN					
Depok Yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Modern dan Partisipatif	Tersusunnya Arsip Daerah Yang Berkualitas Tinggi	1 Meningkatkan Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah Yang Tertib	1 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
				2 Nilai Sakip	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
			2 Meningkatnya keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1 Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
URUSAN PERPUSTAKAAN					
Depok Yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera	Mewujudkan Masyarakat Yang Religius dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan dan Ketahanan Keluarga	Berkembangnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat Kota Depok	Berkembangnya Budaya Gemar Membaca	1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
				2 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	
				3 Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	

TABEL 4.2.

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs TAHUN 2023

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			TARGET TAHUN 2023	Indikatif Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
TARGET 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						
INDIKATOR 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.						
PROGRAM 1 (SATU)	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	59.43	1.354.499.750	
Kegiatan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	100%	750.000.000	APBD Kota Depok Diskarpus
Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah Bahan Pustaka Yang Terpelihara	1000 Layanan	30.000.000	APBD Kota Depok Diskarpus
Sub Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah koleksi perpustakaan	11 Perpustakaan	20.000.000	APBD Kota Depok Diskarpus
Sub Kegiatan	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data dan informasi perpustakaan, Jumlah tenaga perpustakaan	2 dok	700.000.000	APBD Kota Depok Diskarpus
Kegiatan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pembudayaan Gemar Membaca	100%	604.499.750	
Sub Kegiatan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat		Cakupan Layanan Perpustakaan Keliling; Jumlah Tenaga Perpustakaan Keliling	450 lokus	512.999.950	APBD Kota Depok Diskarpus
Sub Kegiatan	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Jumlah lomba, Jumlah Bedah Buku ; jumlah Pelatihan	6 orang	49.999.800	APBD Kota Depok Diskarpus
Sub Kegiatan	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah TBM Yang Dibina Jumlah Yang Mendapatkan Pendampingan	11 Perpustakaan	41.500.000	APBD Kota Depok Diskarpus
JUMLAH					1.354.499.750	

Rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok tahun 2023 mencakup 4 program yang terdiri dari 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

TABEL 4.3.
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
4	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Tabel 4.4.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023 DAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024 PEMERINTAH KOTA DEPOK**

Nama OPD : 1.02.18.01. -DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
						APBD Kota	APBD Prop.	APBN/ Hibah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 24 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda		100%	10.767.610.016					100%	12.954.559.314
2 24 01 02:0 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	188.663.700					100%	85.000.000
2 24 01 02:0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Kota Depok	4 Dokumen	155.663.750	v	-	-		4 Dokumen	50.000.000
2 24 01 02:0 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reliabilitas Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Depok	17 laporan	32.999.950	v	-	-		17 laporan	35.000.000
2 24 01 02:0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangann tepat waktu		100%	9.097.971.066					100%	10.097.371.266
2 24 01 02:0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Depok	12 Bulan 50 Orang	9,082,371,266	v	-	-		12 Bulan 50 Orang	11,090,608,393

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2023

2	24	01	02.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kota Depok	18 Dokumen	14.999.800	v	-	-		18 Dokumen	16.500.000
2	24	01	02.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah		100%	53.713.200					100%	95.000.000
2	24	01	02.0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Depok	2 dokumen	24.999.800	v	-	-		2 dokumen	40.000.000
2	24	01	02.0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Depok	12 Dokumen	28.713.400	v	-	-		12 Dokumen	55.000.000
2	24	01	02.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian		100%	126.491.600					100%	154.950.000
2	24	01	02.0 5	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Depok	12 dokumen	20.049.800	v	-	-		12 dokumen	40.000.000
2	24	01	02.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Depok	60 orang	106.441.800	v	-	-		60 orang	114.950.000
2	24	01	02.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran		100%	951.063.450					100%	1.215.445.921
2	24	01	02.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Depok	4 paket	54.998.400	v	-	-		4 paket	66.500.000

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2023

2	24	01	02.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Depok	1 Paket 4 Paket	430,000,000	v	-	-	1 Paket 4 Paket	665.380,000
2	24	01	02.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Depok	4 paket	70.000.000	v	-	-	4 paket	90.750.000
2	24	01	02.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Depok	11 paket	86.240.000	v	-	-	11 paket	121.000.000
2	24	01	02.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Depok	2 paket	95.508.050	v	-	-	2 paket	78.535.921
2	24	01	02.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Depok	350 laporan	214.317.000	v	-	-	350 laporan	203.280.000
2	24	01	02.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara		100%	350.307.000				100%	259.050.000
2	24	01	02.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Depok	10 unit	144.820.000	v	-	-	10 unit	139.755.000
2	24	01	02.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Depok	10 unit	69.987.000	v	-	-	10 unit	78.650.000
2	24	01	02.0 9	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Depok	2 unit	135.500.000	v	-	-	2 unit	78.650.000
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku		42,1%	1.999.859.000				42,1%	1.558.550.000
2	24	02	02.0 1		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Arsip Aktif Yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip		100%	1.530.426.800				100%	1.189.500.000

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2023

2	24	02	02.0 1	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kota Depok	80 berkas	1.475.490.000	v	-	-	80 berkas	1.113.200.000
2	24	02	02.0 1	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kota Depok	4 berkas	24.937.000	v	-	-	4 berkas	36.300.000
2	24	02	02.0 1	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Depok	38 laporan	29.999.800				38 laporan	40.000.000
2	24	02	02.0 2		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Statis		100%	258.793.000	v			100%	181.500.000
2	24	02	02.0 2	01	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kota Depok	50 arsp	258.793.000	v	-	-	50 arsip	181.500.000
2	24	02	02.0 3		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Cakupan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasiona		100%	210.639.200				100%	187.550.000
2	24	02	02.0 3	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	umlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kota Depok	140 pengguna	177.499.450	v	-	-	140 pengguna	96.800.000
2	24	02	02.0 3	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok	46 laporan	33.139.750	v	-	-	46 laporan	90.750.000
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		40%	127.266.850				40%	261.250.000

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2023

2	24	03	02.0 1		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Cakupan Arsip Yang Dimusnahkan dibawah 10 Tahun		100%	46.561.000						100%	120.750.000
2	24	03	02.0 1	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kota Depok	10 arsip	32.219.000	v	-	-			10 arsip	90.750.000
2	24	03	02.0 1	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10	Kota Depok	7 berkas	14.342.000						7 berkas	30.000.000
2	24	03	02.0 2		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Cakupan Arsip Yang Diselamatkan Akibat Bencana		100%	48.699.850						100%	60.500.000
2	24	03	02.0 2	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Kota Depok	20 arsip	48.699.850	v	-	-			20 Arsip	60.500.000
2	24	03	02.0 3		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Cakupan Arsip Yang Diselamatkan Yang Digabung dan/ atay Dibukarkan		100%	32.006.000						100%	80.000.000
2	24	03	02.0 3	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	Kota Depok	2 Daftar	16.003.000	v	-	-			2 Daftar	40.000.000
2	24	03	02.0 3	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau	Kota Depok	2 Arsip	16.003.000						2 Arsip	40.000.000

					Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat daerah kabupaten/kota													
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			59.43	1.796.052.500								59.43	2.064.669.705
2	23	02	02:01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah			100%	1.111.296.000								100%	1.363.939.705
2	23	02	02:01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Kota Depok	1 layanan		29.528.000	v	-	-					1000 layanan	27.830.000
2	23	02	02:01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kota Depok	11 Perpustakaan		14.220.000								11 perustakaan	30.000.000
2	23	02	02:01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Depok	10 perpustakaan		4.688.000								10 perpustakaan	30.000.000
2	23	02	02:01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kota Depok	5000 eksemplar		364.352.000	v	-	-					5000 eksemplar	484.000.000
2	23	02	02:01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Depok	2 dok		698.508.000	v	-	-					2 dok	792.109.705
2	23	02	02:02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca			100%	684.756.500								100%	700.730.000

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2023

2	23	02	02.0 2	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kota Depok	450 lokus	512.999.950	v	-	-	450 lokus	429.620.000
2	23	02	02.0 2	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kota Depok	6 orang	46.001.800	v	-	-	6 orang	212.960.000
2	23	02	02.0 2	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kota Depok	11 Perpustakaan	100.500.000	v	-	-	11 Perpustakaan	18.150.000
2	23	02	02.0 2	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keegiatannya	Kota Depok	22 Orang	25.254.750				22 Orang	40.000.000
JUMLAH									14.690.788.366					16.836.029.019

BAB V PENUTUP

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan di bidang kearsipan dan perpustakaan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efisien dan seefektif mungkin.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas Kota Depok dengan tema dan prioritas Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.

Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya menjabarkan secara ringkas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan menterjemahkan visi dan misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dan merupakan hasil Forum Perangkat Daerah (Forum PD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2022 sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok serta peran aktif seluruh stakeholder.

Depok, Mei 2022

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KOTA DEPOK



f SITI CHAERIJAH AURIJAH, SPd.,MM.
NIP. 19680408 199103 2 008



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Margonda Raya No. 54 Telp/Fax. : (021) 77200936
Kota Depok 16431

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Nomor : 050/257- sdevet
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2023

- Menimbang : a. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD 2019 telah ditetapkan Kegiatan Penyusunan Renja OPD dan Pelaksanaan Forum OPD yang didalamnya mengatur pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Nomor 19

- Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional(Lembaran Negara Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2015);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
26. Peraturan Walikota Depok Nomor 47 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

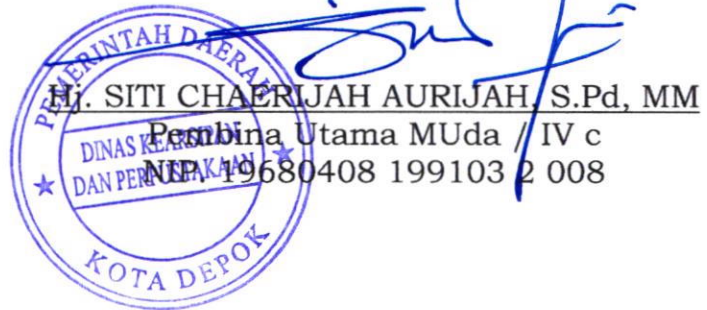
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah :
- Mengkoordinasikan, mengumpulkan dan mengolah Rencana Kerja 2023 yang berpedoman pada RPJMD dan Renstra;

- Mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dalam pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada penanggungjawab tim (Kepala Dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Tahun 2023;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di DEPOK
Pada 4 Januari 2022

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAN
KOTA DEPOK



Lampiran :
Nomor :
Tanggal :

Tentang :

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023 DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Penanggungjawab: Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Ketua : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sekretaris : Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Anggota : Kabid Pengelolaan Arsip
: Kabid Pembinaan Layanan Pemanfaatan dan Jasa
Kearsipan
: Kabid Perpustakaan
: Kasubag Keuangan
: Kasubag Umum dan Kepegawaian
: Pelaksana Subag Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
: Pelaksana Subag Umum dan Kepegawaian
: Pelaksana Subag Keuangan

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA DEPOK



[Handwritten Signature]
H. Siti Chaerijah Auriyah, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19680408 199103 2 008